

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategi globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang



diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Ketika reformasi bergelora di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang memberikan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani, aman dan sejahtera seperti yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional, sehingga pada tahun-tahun ke depan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi negara dewasa ini.

Untuk mengidentifikasi bagaimana harapan pemangku kepentingan terhadap pemerintah, jika dilihat dari sasaran reformasi birokrasi, berkaitan dengan hal-hal yang sudah tercapai dengan baik dan hal-hal yang dipandang masih menjadi permasalahan untuk tahun kedepannya, keberhasilan reformasi birokrasi diharapkan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, nilai-nilai etika dan budaya kerja, kualitas pelayanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen. Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program prioritas sebagai jawaban dari tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena hal ini sejalan dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi sesuai bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh sebab itu, tuntutan ini merupakan suatu hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



Upaya terselenggaranya Good Governance secara optimal merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung lebih berdayaguna, berhasil guna, responsif, transparan, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum yang adil dan merata. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1. Dasar Hukum Penyusunan LKIP.

LKIP Kabupaten Bireuen sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2016 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55879 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Nomor 58 tambahan 5679.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Kabupaten Bireuen merupakan bagian integral dari siklus *akuntabilitas kinerja* yang utuh dan komprehensif.



Berdasarkan siklus tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran. Secara selaras dan berkesinambungan, setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten menetapkan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Rencana Strategis yang telah didefinisikan.

LKIP Kabupaten Bireuen merupakan sebuah bentuk laporan yang dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, yang sekaligus juga menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bireuen. Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada para stakeholder, maka penyusunan LKIP Kabupaten Bireuen ini memiliki 2 (dua) dimensi fungsi, yaitu:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja (Dimensi eksternal);** hal ini bermakna bahwa LKIP merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada seluruh pihak eksternal (stakeholder) atas capaian kinerja selama periode tahun 2016. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode pelaporan.
- **Aspek Manajemen Kinerja (Dimensi Internal);** hal ini bermakna bahwa LKIP Kabupaten Bireuen merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Esensi yang termaktub dalam hal ini adalah untuk setiap kekurangan atau celah dalam pelaksanaan kinerja akan ditemukan strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan patokan pembelajaran saat pelaksanaan program dan kegiatan pada periode anggaran berikutnya.



Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, LKIP Kabupaten Bireuen tahun 2016 ini bertujuan untuk :

- Memberi informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen selama satu tahun anggaran 2016.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen sekaligus menjadi acuan dan masukan dalam rangka perbaikan kinerja SKPK Pemerintah Kabupaten Bireuen pada tahun berikutnya.
- Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan.
- Mendorong pemenuhan aspek efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Bireuen termasuk dalam upaya penggunaan sumberdaya alam.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

1. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Bireuen dalam catatan sejarah dikenal sebagai daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa, Kerajaan Jeumpa terletak di Desa Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

Kerajaan-kerjaan kecil di Aceh tempo dulu termasuk Jeumpa mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke Malaka pada tahun 1511 M yang disusul dengan kedatangan Belanda. Secara de facto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menduduki Benteng Kuta Glee di Batee Iliiek, di bagian barat Kabupaten Bireuen.

Kemudian dengan Surat Keputusan Vander Guevernement General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi menjadi enam Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Salah satunya adalah Afdeeling Noord Kust van Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang dibagi dalam tiga Onder Afdeeling (kewedanan).Kewedanan dikepalai oleh seorang Countroleur



(wedana) yaitu: Onder Afdeeling Bireuen (kini Kabupaten Bireuen), Onder Afdeeling Lhokseumawe (Kini Kota Lhokseumawe) dan Onder Afdeeling Lhoksukon (Sekarang jadi Ibu Kota Aceh Utara). Selain Onder Afdeeling tersebut, terdapat juga beberapa daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu Ulee Balang Keureutoe, Geureugok, Jeumpa dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik. Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling diganti dengan Gun, Zelf Bestuur disebut Sun. Sedangkan mukim disebut Kun dan gampong disebut Kumi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh Utara disebut Luhak, yang dikepalai oleh Kepala Luhak sampai tahun 1949. Kemudian, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur, Aceh dan Sumatera Utara tergabung didalamnya dalam Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melalui Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Keberadaan Aceh dibawah Provinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas masyarakat Aceh. Para tokoh Aceh menuntut agar Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Hal ini juga yang kemudian memicu terjadinya pergolakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953. Pergolakan ini baru padam setelah keluarnya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/ Missi/ 1957 tentang pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara sebagai salah satu daerah Tingkat dua, Bireuen masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Baru pada tahun 1999 Bireuen menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku Kabupaten Induk, pada tanggal 12 Oktober 1999, melalui Undang Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000.



Beragam kisah heroik terekam dalam catatan sejarah, dan pada benteng pertahanan di Batee Iliek menjadikan daerah terakhir yang diserang oleh pasukan Belanda yang menyisakan kisah kepahlawanan pejuang Aceh dalam menghadapi serangan Belanda.

Beragam kisah heroik terekam dalam catatan sejarah, dan pada benteng pertahanan di Batee Iliek menjadikan daerah terakhir yang diserang oleh pasukan Belanda yang menyisakan kisah kepahlawanan pejuang Aceh dalam menghadapi serangan Belanda. Kisah heroik lainnya terekam pada situs sejarah makam syahid lapan di Kecamatan Simpang Mamplam. Pelintas jalan Medan-Banda Aceh, sering menyinggahi tempat ini untuk ziarah. Di kuburan itu, delapan syuhada dikuburkan. Mereka wafat pada tahun 1902 saat melawan pasukan Marsose Belanda.

Menurut penuturan sejarah, delapan syuhada tersebut berhasil menewaskan pasukan Marsose yang berjumlah 24 orang namun ketika mereka mengumpulkan senjata dari tentara Belanda yang tewas itu, mereka diserang oleh pasukan Belanda lainnya yang datang dari arah Jeunieb yang menewaskan delapan pejuang aceh tersebut, kedelapan pejuang yang syahid adalah Tgk Panglima Prang Rayeuk Djurong Bindje, Tgk Muda Lem Mamplam, Tgk Nyak Bale Ishak Blang Mane, Tgk Meureudu Tambue, Tgk Balee Tambue, Apa Sjech Lantjok Mamplam, Muhammad Sabi Blang Mane, serta Nyak Ben Matang Salem Blang Teumeuleuk. Nama mereka tertera pada situs makam yang dikenal sebagai kubu syuhada lapan yang terletak di pinggir jalan lintas Banda Aceh - Medan di kawasan Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.



Istana Tun Sri Lanang atau yang dikenal dengan nama Rumoh Krueng adalah sebuah bangunan tempat tinggal Tun Sri Lanang tahun 1613-1659. Yang terletak di desa Meunasah lueng Kecamatan Samalanga.

Istana Tun Sri Lanang terbuat dari kayu beratap rumbia yang menghadap ke arah selatan dengan denah persegi panjang yang berukuran 18 x 12,17 meter, Istana ini memiliki ciri khas rumah adat tradisional Aceh, berbentuk rumah panggung dengan atap Pelana / Perisai, dua serambi dalam bahasa aceh disebut seramoe keue dan seramo likoet, seramoe keue (serambi depan) berfungsi untuk tempat bertamu bagi kaum laki-laki dan seramoe likoet atau serambi belakang untuk tamu kaum perempuan, dan pada bagian tengah ada kamar tidur dalam bahasa Aceh disebut Juree. Secara umum bangunan atau Istana Tun Sri lanang ini didominasi oleh warna putih dengan pemakaian warna hijau sebagai penegasan bentuk elemen bangunan. Selain asal usul nama daerah yang baik dan unik, Kabupaten Bireuen juga dikenal sebagai Kota Juang. Meuligoe Bupati Bireuen yang terletak di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pernah menjadi tempat pengasingan Presiden Soekarno. Selain itu Bireuen pernah menjadi ibukota RI ketiga selama seminggu, setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah dalam agresi Belanda.





Pada awal berdirinya Kabupaten Bireuen dipimpin oleh Mustafa A Glanggang dengan susunan wilayah administratif 10 Kecamatan. Kecamatan yang terbentuk saat itu adalah :

1. Kecamatan Samalanga
2. Kecamatan Pandrah
3. Kecamatan Jeunieb
4. Kecamatan Peudada
5. Kecamatan Juli
6. Kecamatan Jeumpa
7. Kecamatan Jangka
8. Kecamatan Peusangan
9. Kecamatan Makmur
10. Kecamatan Gandapura

Menjelang tahun 2005 berdasarkan UU tahun 2004 terjadi pemekaran kecamatan. Dari 10 Kecamatan menjadi 17 kecamatan, kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Simpang Mamplam dengan dasar UU N0. 45 tahun 2004 yang di mekarkan dari Kecamatan Samalanga.
2. Kecamatan Plimbang dengan dasar UU N0. 43 tahun 2004 yang di mekarkan dari Kecamatan Jeunieb
3. Kecamatan Kota Juang dengan dasar UU N0. 40 tahun 2004.
4. Kecamatan Kuala dengan dasar UU N0. 41 tahun 2004.
5. Kecamatan Peusangan Selatan dengan dasar UU N0. 42 tahun 2004 .
6. Kecamatan Peusangan Sibbleh Krueng dasar UU N0. 46 tahun 2004.
7. Kecamatan Kuta Blang dengan dasar Pembentukan UU N0. 44 tahun 2004.



Kecamatan Kota Juang dan Kuala, dimekarkan dari kecamatan Jeumpa, Kecamatan Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng dimekarkan dari Kecamatan Peusangan, sementara Kecamatan Kuta Blang di mekarkan dari Kecamatan Gandapura. Pembentukan 17 Kecamatan ini diperbaharui dengan UU No.5 Tahun 2008.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23 kabupaten/ kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Aceh. Posisi geografis Bireuen sangat strategis dibanding kabupaten lain, karena berada di bagian Timur Provinsi Aceh yang menghubungkan bagian tengah sampai bagian barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Selat Malaka). Kabupaten Bireuen menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan). Nilai strategis Kabupaten Bireuen adalah sebagian wilayah selatan merupakan perbukitan dan wilayah utara didominasi oleh kawasan pesisir pantai.

Secara geografis, posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara $4^{\circ} 54'$ - $5^{\circ} 21'$ Lintang Utara (LU) dan $96^{\circ} 20'$ - $97^{\circ} 21'$ Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,32 kilometer persegi (km^2) atau seluas 179.632 hektar (Ha). Luas wilayah Kabupaten Bireuen tersebut adalah sekitar 3,13 persen dari total luas wilayah Provinsi Aceh secara keseluruhan ($57.365,57 \text{ km}^2$). Secara administrasi, wilayah daerah Kabupaten Bireuen secara langsung berbatasan pada masing-masing sisi sebagai berikut :

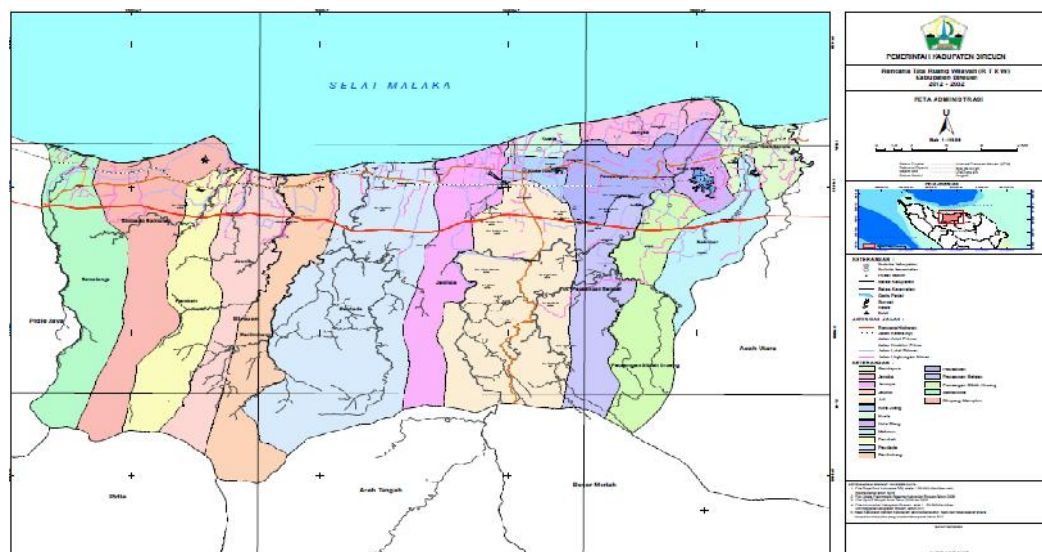
- Sebelah Utara : berbatas dengan Selat Malaka;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.

Wilayah Kabupaten Bireuen memiliki posisi strategis, karena terletak sebagai berikut :

- Kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera yang merupakan kawasan cepat berkembang di Pulau Sumatera, dibandingkan dengan kawasan tengah dan kawasan Pantai Barat Sumatera.
- Berdekatan dengan pusat pertumbuhan Kota Lhokseumawe dan Medan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Disamping itu, di Kota Medan juga terdapat Pelabuhan dan Bandar Udara Internasional.
- Berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan internasional yang padat.
- Dilintasi oleh Jalan Trans Sumatera, yang merupakan jalur perdagangan yang padat di Pulau Sumatera. Di masa mendatang, Jalan Trans Sumatera pada ruas antara Medan sampai Bandar Lampung direncanakan untuk dikembangkan sebagai jalan internasional Trans Asia dan Trans Asean.

Kabupaten Bireuen juga di lalui oleh 17 sungai, yaitu Krueng Samalanga, Krueng Inong, Krueng Agam, Krueng Pandrah, Krueng Jeunieb, Krueng Suyoh, Krueng Nalan, Krueng Peudada, Krueng Uneun, Krueng Wie, Krueng Bugeng, Krueng Simpo, Krueng Meuh, Krueng Gunci, Krueng Pineueng, Krueng Mane, Krueng Peusangan yang seluruhnya bermuara ke Selat Malaka.

Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen



3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,32 Km² atau (179.632 Ha), terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 Mukim dan 609 Gampong (desa). Kecamatan Peudada mempunyai wilayah (312,84 Km²) dan Juli (231,18 Km²), sementara kecamatan Kota Juang dengan wilayah paling kecil yaitu 16,91 Km². Jumlah Gampong (desa) yang terbanyak terdapat di Kecamatan Peusangan dengan jumlah 69 gampong dan banyaknya Penduduk 52.907, dan gampong yang kecil terdapat di Kecamatan Kota Juang dengan jumlah Penduduk 49.758 jiwa.

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bireuen. Klasifikasi penggunaan lahan terdiri dari pekarangan, sawah dengan luas nya. 22.601,00 Ha atau 11,89 persen, Tegal/Kebun 49.403,00 Ha atau 25,99 persen, ladang/ Huma 21.402,00 Ha atau 11,26 persen, perkebunan 20.263,00 Ha atau 10,66 persen, hutan rakyat 9.517,00 Ha atau 5,01 persen, padang rumput 7.868,00 Ha atau 4,1 persen, lain-lain 18.678,00 Ha atau 9,82 persen, Lahan Bukan Pertanian 40.389,00 Ha atau 21,24 persen.



Sumber : (Bireuen Dalam Angka Tahun 2015).



4. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Bireuen. Sebagai *input* dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data statistik , jumlah penduduk Kabupaten Bireuen tahun 2015 adalah 435.300 jiwa, yang terdiri atas 212.907 jiwa laki-laki dan 222.393 jiwa perempuan. Dibanding dengan tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen meningkat 8,52 persen, dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk kabupaten Bireuen masih sebanyak 398.201 jiwa.

jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bireuen tahun 2015 berjumlah 100.505RT, dengan anggota keluarga sebanyak 4 - 5 jiwa per rumah tangga. Kondisi ini relatif sama dengan daerah-daerah lain di provinsi Aceh. Penyebaran penduduk masih bertumpu pada beberapa kecamatan yang dekat dengan ibukota Kabupaten. Kecamatan Peusangan, Kota Juang dan Jeumpa adalah tiga kecamatan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yang masing-masing berjumlah 52.907 jiwa, 49.758 jiwa, dan 36.185 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Bireuen yaitu 1,796.32 kilometer persegi yang berpenduduk 435.300 jiwa dan tersebar di 17 Kecamatan, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bireuen adalah 229 jiwa per kilometer persegi.

Komposisi penduduk di kabupaten Bireuen pada tahun 2015, lebih didominasi oleh kaum perempuan dengan *sex ratio* sebesar 95,73 yang artinya penduduk perempuan di kabupaten ini 2,17 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2015

No	Kecamatan/Sub District	Penduduk (Jiwa)/ <i>Population</i>				Ratio Jenis Kelamin/ Sex Ratio
		Gampong/ <i>Gampong</i>	Laki-Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	L + P/ <i>Total</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1	Samalanga	46	15.260	15.357	30.617	99,37
2	Sp.Mamplam	41	13.791	13.773	27.564	100.13
3	Pandrah	19	4.166	4.362	8.528	95.51
4	Jeunieb	43	12.267	12.855	25.122	95.43
5	Peulimbang	22	5.526	6.015	11.541	91.87
6	Peudada	52	13.017	13.760	26.777	94.60
7	Juli	36	15.986	16.290	32.276	98.13
8	Jeumpa	42	18.173	18.012	36.185	100.89
9	Kota Juang	23	24.834	24.924	49.758	99.64
10	Kuala	20	8.606	9.363	17.969	91.91
11	Jangka	46	13.775	14.763	28.538	93.31
12	Peusangan	69	25.463	27.444	52.907	92.78
13	Peusangan Selatan	21	7.096	7.592	14.688	93.47
14	Psg Sibbleh Krueng	21	5.650	6.066	11.716	93.14
15	Makmur	27	7.443	8.005	15.448	92.98
16	Gandapura	40	11.036	12.178	23.214	90.62
17	Kuta Blang	41	10.818	11.634	22.452	92.99
Jumlah/Total		609	212.907	222.393	435.300	95.73

Sumber : Bireuen Dalam Angka Tahun 2016

Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk berusia muda (umur 0-4 tahun hingga 20-24 tahun) lebih dominan, yaitu mencapai 44.363 jiwa(0-4 tahun) 41.255 jiwa(20-24 tahun). Sementara penduduk yang berusia 60 tahun keatas terlihat relatif sedikit, yakni berjumlah 12.444 jiwa. Dengan komposisi penduduk berumur muda dan produktif yang lebih banyak, maka pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki beban yang berat pada masa yang



akan datang, baik dalam menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang masuk dalam kategori usia belajar, maupun dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang termasuk angkatan kerja produktif.

C. PEREKONOMIAN DAERAH

Sesuai letak wilayah, geografi maupun kondisi topografi wilayahnya, Kabupaten Bireuen merupakan daerah dengan potensi pengembangan sektor pertanian yang cukup besar dan prospektif. Kondisi tersebut kiranya sejalan dengan gambaran riil dari kenyataan yang terlihat selama ini, dimana dari sisi kontribusi sektoral, sektor pertanian merupakan sektor paling dominan diantara sektor-sektor lainnya dalam pembentukan PDRB, yang menjadi '*format desain*' perekonomian daerah Kabupaten Bireuen selama ini. Hal tersebut tentunya sekaligus menjadi bentuk penegasan bahwa pada dasarnya konsep pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Bireuen, perlu terus diarahkan pada berbagai upaya terkait dengan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian secara lebih terpadu, komprehensif dan lebih luas lagi.

Dominasi dari komponen sub-sektor maupun komoditi yang ada dalam sektor pertanian tersebut, peran sub-sektor tanaman pangan, terutama padi dan kedelai, menempatkan kedua jenis komoditi tersebut sebagai komoditi unggulan daerah. Berdasarkan luas lahan yang ada saat ini, pengalihan fungsi peruntukan lahan yang diakibatkan oleh gencarnya pembangunan fisik infrastruktur, terutama perumahan dan kawasan perdagangan, dibutuhkan perhatian serius dari semua pihak terkait dalam upaya mempertahankan keberadaan fungsi lahan pertanian di daerah, termasuk dengan terus mengupayakan peningkatan luas areal tanam, penyediaan infrastruktur produksi yang lebih baik, maupun intensifikasi dalam bentuk penggunaan teknologi produksi hasil pertanian yang dapat terus meningkatkan produktifitas hasil produksi pangan yang dihasilkan dari daerah ini.

Selain padi, Kabupaten Bireuen selama ini juga dikenal sebagai daerah penghasil dari sejumlah jenis komoditi tanaman pangan lain, yang dinilai masih belum cukup optimal dalam hal penggarapan maupun pengembangannya. Komoditi jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, ketimun,



cabe, kangkung, dan semangka, merupakan komoditi yang juga dihasilkan di daerah ini. Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bireuen akan terus dilaksanakan secara lebih maksimal, sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain penyediaan prasarana fisik seperti irigasi, jalan produksi pertanian, maupun bantuan alat-alat pendukung produksi lainnya, termasuk kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat secara individual maupun kelompok.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Bireuen secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Bireuen Tahun 2011 - 2015
Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)

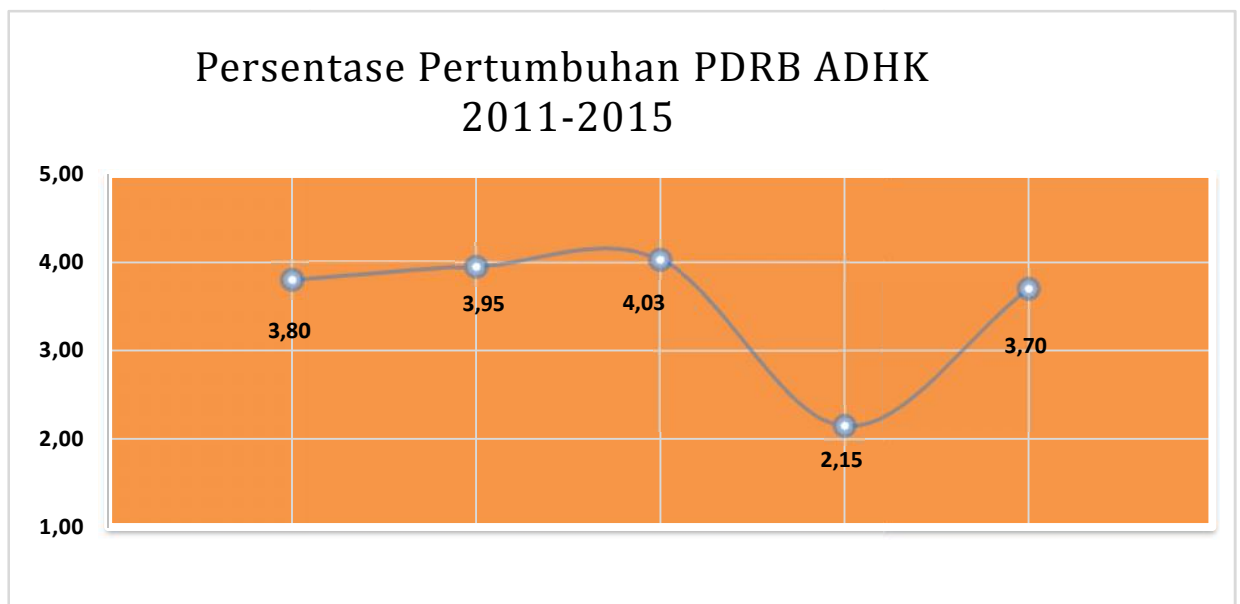
SEKTOR	2011		2012		2013		2014*		2015**
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.454.615,40	33,18	2.518.474,50	32,75	2.584.308,50	32,31	2.566.955,10	31,41	2.662.379,90
Pertambangan & Penggalian	207.094,90	2,80	213.647,10	2,78	220.199,30	2,75	226.751,50	2,77	232.737,80
Industri Pengolahan	123.337,60	1,67	127.973,50	1,66	131.963,20	1,65	136.424,70	1,67	136.805,50
Listrik, gas	4.993,00	0,07	5.393,90	0,07	5.782,70	0,07	6.193,90	0,08	6.722,60
Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.364,60	0,03	2.495,70	0,03	2.729,20	0,03	3.071,20	0,04	3.356,80
Konstruksi	623.132,90	8,42	658.127,30	8,56	684.131,00	8,55	693.575,50	8,49	724.994,50
Perdagangan, Reperasi Mobil & Sepeda motor	1.755.533,60	23,73	1.840.525,30	23,93	1.929.959,10	24,13	2.024.527,10	24,78	2.102.560,10
Transportasi dan Pergudangan	738.997,90	9,99	782.725,40	10,18	839.343,00	10,49	864.291,00	10,58	880.292,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78.137,20	1,06	80.662,50	1,05	83.717,60	1,05	85.207,60	1,04	87.779,40
Informasi dan Komunikasi	222.334,70	3,01	227.104,00	2,95	231.928,90	2,90	235.323,70	2,88	245.230,90
Jasa Keuangan dan Asuransi	88.665,70	1,20	90.504,60	1,18	91.039,90	1,14	88.240,40	1,08	89.474,80
Real Estate	223.903,30	3,03	228.706,30	2,97	233.565,20	2,92	240.984,00	2,95	246.416,70
Jasa Perusahaan	21.043,10	0,28	22.088,90	0,29	23.193,40	0,29	23.532,90	0,29	24.213,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	501.177,60	6,77	524.625,20	6,82	552.541,70	6,91	580.458,20	7,10	611.477,60
Jasa Pendidikan	121.822,00	1,65	124.409,40	1,62	126.996,90	1,59	129.584,40	1,59	135.665,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136.982,80	1,85	146.767,20	1,91	160.702,80	2,01	167.336,00	2,05	179.300,60
Jasa Lainnya	93.493,50	1,26	95.475,60	1,24	97.427,20	1,22	98.853,30	1,21	104.151,80

* Angka Perbaikan

** Angka Sementara

Sumber BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bireuen. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Bireuen selama periode 2011–2015 juga menunjukkan trend peningkatan. Besaran rata-rata nilai PDRB ADHK Kabupaten Bireuen selama kurun waktu tersebut adalah 3,33 persen per-tahun. Secara absolut, nilai PDRB ADHK pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 8,47 triliun, yang meningkat bila dibandingkan dengan nilai PDRB ADHK tahun 2011 sebesar Rp. 7,40 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2011-2015 telah terjadi peningkatan produktivitas (output) secara agregat dari seluruh lapangan usaha yang ada di Kabupaten Bireuen. Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Sumber BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2016

Sedangkan bila dihitung atas dasar harga berlaku, nilai PDRB Kab. Bireuen selama tahun 2011-2015 juga terus mengalami pertumbuhan positif, dimana pada tahun 2011, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen tercatat sebesar sebesar Rp. 7,66 triliun, dan terus meningkat menjadi Rp. 8,25 triliun di tahun 2012 atau naik sebesar 7,04 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya di tahun 2013 adalah sebesar Rp. 8,88 triliun yang juga naik sebesar 7,13 persen dari tahun sebelumnya. Namun ditahun 2014 dan 2015, meskipun nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 9,40 triliun dan 10,04 triliun, tapi bila dibandingkan dari besaran peningkatan tahun sebelumnya terjadi penurunan, dimana pada tahun 2014 dan



2015 PDRB ADHB Kabupaten Bireuen masing-masing hanya meningkat sebesar 5.52 persen dan 6.40 persen. Secara lebih terperinci, nilai PDRB Bireuen atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Bireuen Tahun 2011 - 2015
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)

SEKTOR	2011		2012		2013		2014*		2015**	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.609.612,1	34,05	2.813.134,8	34,12	3.035.301,9	34,19	3.174.748,4	33,78	3.419.773,7	34,06
Pertambangan & Penggalian	214.411,80	2,80	226.280,80	2,74	238.149,90	2,68	259.019,00	2,76	272.471,50	2,71
Industri Pengolahan	128.484,70	1,68	137.353,50	1,67	148.092,20	1,67	164.691,70	1,75	169.871,20	1,69
Listrik, gas	4.762,50	0,06	4.766,40	0,06	4.886,70	0,06	5.398,20	0,06	6.068,40	0,06
Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.519,90	0,03	2.806,20	0,03	3.538,70	0,04	4.223,30	0,04	4.720,50	0,05
Konstruksi	642.863,60	8,39	721.401,00	8,75	769.698,50	8,67	800.513,60	8,52	857.204,50	8,54
Perdagangan, Reperasi Mobil & Sepeda motor	1.778.267,0	23,20	1.877.112,6	22,77	1.975.958,2	22,26	2.079.046,6	22,12	2.224.594,6	22,16
Transportasi dan Pergudangan	765.117,20	9,98	838.125,90	10,17	928.532,80	10,46	986.731,20	10,50	1.005.605,00	10,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81.186,50	1,06	85.692,40	1,04	92.394,80	1,04	98.578,20	1,05	105.496,00	1,05
Informasi dan Komunikasi	224.580,30	2,93	232.282,00	2,82	242.383,60	2,73	248.673,90	2,65	263.826,70	2,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	93.661,60	1,22	104.868,40	1,27	111.161,50	1,25	113.053,00	1,20	118.870,50	1,18
Real Estate	230.799,60	3,01	240.576,20	2,92	251.176,00	2,83	270.703,20	2,88	281.997,90	2,81
Jasa Perusahaan	22.027,90	0,29	23.957,70	0,29	26.612,10	0,30	28.486,00	0,30	30.588,20	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	501.628,60	6,54	545.505,30	6,62	616.912,80	6,95	691.906,20	7,36	754.567,30	7,52
Jasa Pendidikan	123.273,20	1,61	126.291,30	1,53	134.239,00	1,51	145.831,40	1,55	159.577,10	1,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142.544,10	1,86	162.148,00	1,97	191.252,60	2,15	211.788,10	2,25	238.381,90	2,37
Jasa Lainnya	98.872,60	1,29	102.827,10	1,25	107.947,80	1,22	115.607,10	1,23	126.873,00	1,26
PDRB	7.664.613,20	100,00	8.245.129,60	100,00	8.878.239,10	100,00	9.398.999,10	100,00	10.040.488,00	100,00

* Angka perbaikan

** Angka sementara

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen 2016

Perkembangan Produk Domestik regional Bruto baik Atas Dasar Harga Kostan dan Atas Dasar Darga Berlaku merupakan bagian dari upaya kerja keras masyarakat dan pemerintah daerah melalui implementasi berbagai program dan



kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini, termasuk di dalamnya peran serta pelaku dunia usaha/swasta dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN APARATUR

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kabupaten Bireuen didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2016 sejumlah 9.755 orang yang terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut :

- Golongan I : 78 orang, Golongan II : 2.515 orang, Golongan III : 4.310 orang, Golongan IV : 2.852 orang;
- Jabatan Struktural yang terdiri dari Eselon II : 29 orang, Eselon III : 155 orang, Eselon IV : 486 orang.

Jabatan Fungsional terdiri dari : Jabatan Tenaga Guru : 3.309 orang, Tenaga Kesehatan : 1.373 orang dan Tenaga Teknis/Administrasi lainnya : 3.120 orang;

- Tingkat Pendidikan terdiri dari SD : 18 orang, SMP : 94 Orang, SMA/D1 2.247 orang, D2 : 158 orang, D3 : 1.202 orang, D4 : 76 orang, S1 : 5.782 orang, S2 : 177 orang, S3 : 1 orang.

Sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam bentuk Qanun Kabupaten yang terdiri dari:

- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen;



- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Kabupaten Bireuen;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Kabupaten Bireuen;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bireuen.
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas Pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.



Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah antara lain:

- Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah,
- Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana,
- Pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
- Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah, dan
- Pengembangan dan pelaksanaan pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga,
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, 75 (tujuh lima) Kemukiman dan 609 Gampong/desa.



Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.
- b. Staf Ahli Bupati Bireuen:
 1. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan SDM.
 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama Antar Lembaga.
 3. Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan.
 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 5. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum.
- c. Sekretariat Daerah:
 1. Asisten Pemerintahan :
 - Bagian Pemerintahan Umum.
 - Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong.
 - Bagian Hukum.
 2. Asisten Ekonomi Pembangunan :
 - Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - Bagian Administrasi Pembangunan.
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh.
 3. Asisten Administrasi Umum:
 - Bagian Umum.
 - Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
 - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.
- d. Sekretariat DPRK
 1. Bagian Umum.
 2. Bagian Risalah dan Hukum.
 3. Bagian Keuangan.
- e. Dinas Daerah
 1. Dinas Syariat Islam
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



3. Dinas Kesehatan
 4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 5. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika
 6. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Perumahan Rakyat
 7. Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi
 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
 9. Dinas Pertanian, Peternakan,
 10. Dinas Kelautan dan Perikanan
 11. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 14. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
 15. Dinas Pegelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan
- f. Lembaga Teknis Daerah
1. Inspektorat Kabupaten
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera
 5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
 6. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 10. Kantor Perpustakaan dan Arsip
 11. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen
 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- g. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen
1. Sekretariat MPU
 2. Sekretariat MAA
 3. Sekretariat MPD
 4. Sekretariat BMK



h. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pemerintah Kabupaten Bireuen dan seluruh perangkat di bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi selaku penyelenggara semua urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintahan Kabupaten.

E. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Bireuen. Berdasarkan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bireuen serta mempertimbangkan isu dan dinamika nasional dan regional, maka isu strategis yang harus diatasi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah Kabupaten Bireuen periode 2012-2017 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat.
2. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Masih rendahnya sumber daya manusia yang tercermin dari kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal.
4. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan.
5. Belum memadainya kesediaanya ketersediaan infrastruktur dalam mendorong percepatan perekonomian daerah.
6. Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang belum optimal.
7. Kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
8. Kerentanan keberlanjutan perdamaian.
9. Belum terencana dengan baik pengelolaan dana desa.
10. Belum tersedianya infrastruktur pariwisata islami yang berkualitas.
11. Masih rendahnya kualitas air bersih.

F. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan dan berbagai tantangan strategis yang dihadapi Kabupaten Bireuen, serta merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, maka perlu diketahui Isu Strategis dan permasalahan yang berkembang di tahun 2016 yang sedang dihadapi organisasi, yaitu;

1. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Syari'at Islam.

Nilai-nilai Islami belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Syariat. Pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam masih belum sempurna sehingga masih memerlukan terobosan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk terus mengimplimentasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat. Berbagai perbuatan yang melanggar syariat harus diatasi secara sungguh-sungguh dalam dua tahun ke depan. Upaya tersebut harus didorong melalui penguatan peran ulama dalam pembinaan umat, penguatan dayah dalam mendorong pendidikan Islami, termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Bireuen tidak dapat menutup diri dari derasnya arus globalisasi yang didorong kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta pengaruh budaya luar yang tidak sesuai Syariat. Hal ini menjadi tantangan masyarakat Bireuen untuk senantiasa mempertahankan jati diri sebagai masyarakat yang Islami. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan informasi merupakan keharusan dalam mendorong percepatan pembangunan. Disisi lain, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung merusak jati diri akibat penyalahgunaan, terutama dari generasi muda. Karena itu, pemantapan akidah dan pemahaman Syariat sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kecerdasan masyarakat terhadap infiltrasi budaya asing, termasuk gerakan-gerakan dan pemahaman-pemahaman pendangkalan akidah.



2. Tata kelola pemerintahan yang belum maksimal.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Sejalan dengan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus Provinsi Aceh berdasarkan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) diupayakan terus tercipta. Hal tersebut tentunya berimplikasi positif terhadap peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin pula dari pengelolaan keuangan daerah yang menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional. Pemerintah Kabupaten Bireuen selama 2 (dua) tahun berturut-turut mendapat status *Disclaimer* dari hasil audit BPK terkait dengan laporan keuangan. Pengelolaan keuangan yang profesional merupakan kunci keberhasilan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, dalam jangka menengah ke depan, Pemerintah Kabupaten Bireuen akan terus berupaya menata dan mengelola keuangan daerah yang didasari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan aturan dan perundangan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1), mengamanatkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Lebih lanjut, dalam penyusunannya diupayakan pula belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran bersangkutan. Di sisi lainnya, belanja publik (belanja langsung) yang berimplikasi langsung terhadap kebutuhan masyarakat harus lebih besar dari belanja aparatur (belanja tidak langsung). Kurun waktu lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Bireuen akan terus berupaya secara bertahap untuk meningkatkan alokasi belanja langsung. Upaya tersebut akan ditempuh melalui peningkatan efektivitas belanja tidak langsung, dan upaya lainnya yang berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik.



3. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal.

Kabupaten Bireuen dianugerahi potensi lahan yang subur, tapi belum dikelola dengan baik dan optimal. Meskipun sektor pertanian menyumbang hampir 34,06 persen dalam struktur ekonomi (PDRB) Kabupaten Bireuen, namun dipandang masih kurang berpihak pada petani. Beberapa komoditas pertanian unggulan justru menunjukkan tingkat produktivitas yang rendah. Kedelai, misalnya, rata-rata produksi setiap hektarnya tidak lebih dari 1,61 ton tahun 2015. Hal ini bertolak belakang dengan penetapan Kabupaten Bireuen yang telah ditetapkan sebagai daerah sentra kedelai Nasional. Demikian pula halnya dengan jagung, kacang tanah, dan kacang hijau tingkat produktivitas masing hanya 3,8 ton/ha, 1,55 ton/ha dan 1,52 ton/ha.

Disisi lain, hingga tahun 2015 tidak terdapat lahan sawah yang belum di garap dan dari 45.526 ha semuanya tergarap oleh petani. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan terbatasnya jaringan irigasi teknis. Bahkan, tercatat hampir 6.770 ha sawah masih mengandalkan tadah hujan (kondisi tahun 2014). Adapun luas baku sawah yang dialiri sistem irigasi teknis sekitar 70,04 persen (15.831 ha). Oleh karena itu, pembangunan irigasi tetap menjadi prioritas dalam sisa waktu periode 2016-2017, sehingga lahan tersebut dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi signifikan terhadap kesejahteraan petani.

Potensi lahan perkebunan di Kabupaten Bireuen juga terlihat cukup memadai. Luas lahan perkebunan rakyat mencapai 45.279,50 ha, atau 25,22 persen dari total luas kawasan budidaya. Rata-rata produksi komoditas perkebunan terlihat kurang menggembirakan. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa rata-rata produksi karet hanya 0,25 ton/ha, sagu 4,2 ton/ha, pala 1,95 ton/ha, pinang 1,46 ton/ha, kakao 0,36 ton/ha, kelapa dalam 0,86 ton/ha, kemiri 1,01 ton/ha, dan kelapa sawit 3,02 ton/ha. Implikasinya, sekitar 10.379 RT yang menggantungkan hidup di sektor perkebunan masih terabaikan kesejahteraannya. Kondisi tersebut merupakan permasalahan serius karena terkait dengan pendayagunaan lahan pertanian yang belum optimal dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karenanya, masih



diperlukan kebijakan yang lebih tepat dan terarah dalam upaya peningkatan produktivitas komoditas perkebunan di Kabupaten.

4. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Penduduk Kabupaten Bireuen berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 435.300 jiwa yang terdiri atas 207.664 jiwa penduduk laki-laki dan 215.733 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014 penduduk Bireuen mengalami pertumbuhan sebesar 2,32 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,76 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,86 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Bireuen sebesar 95,73.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bireuen tahun 2015 mencapai 229 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan kota juang dengan kepadatan sebesar 1.577 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Peudada sebesar 68 jiwa/Km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,75 persen dari tahun 2014.

Disisi lainnya, kualitas SDM di Kabupaten Bireuen masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta 63,08 persen kepala keluarga (KK) berpendidikan SD dan tidak tamat SD pada tahun 2014 (BPS, 2015). Akan tetapi, angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 65,79 persen. Kualitas pembangunan manusia Kabupaten Bireuen yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* juga masih relatif rendah yang hanya baru mencapai 68,71 yang masih jauh di bawah rata-rata provinsi dengan angka 69,10 pada tahun 2014.

Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menganggarkan dana desa, sehingga pemerintahan desa menjadi semakin otonom dalam mengelola anggaran khususnya untuk pengembangan ekonomi perdesaan. Akan tetapi, kualitas SDM untuk perencanaan pembangunan ekonomi perdesaan masih



sangat lemah. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Bireuen perlu memprioritaskan pengembangan kualitas SDM aparatur desa dan sistem perencanaan dan penganggaran perdesaan.

5. Disparitas kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dalam menunjang kualitas SDM, Kabupaten Bireuen telah membangun sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai. Namun, disparitas layanan pendidikan antar wilayah/kecamatan masih terjadi, terutama menyangkut distribusi guru berkualitas. Beberapa indikator pendidikan juga mengungkapkan kinerja pendidikan di Kabupaten Bireuen harus terus dibenahi. Akhir tahun 2015, angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Bireuen cenderung lebih baik di tingkat SD/MI (sebesar 98 persen), sementara tingkat SMP/MTs dan SMA/MA masih relatif mengkhawatirkan (masing-masing 86 persen dan 85persen). Akan tetapi APM ini telah menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat tentang arti penting pendidikan terus bertambah. Sementara Angka partisipasi sekolah (APS) juga kurang menggembirakan untuk kelompok usia 16-18 tahun (hanya sebesar 77,39 persen). Apalagi kelompok umur 19-24 yang baru mencapai 32,76 persen (BPS, 2016). Sedangkan rata-rata lama sekolah baru 8,58 tahun pada tahun 2013. Ini menunjukkan masih rendahnya pendidikan penduduk Kabupaten Bireuen secara umum.

Pelayanan kesehatan berkualitas juga belum sepenuhnya terwujud, meskipun Kabupaten Bireuen telah memiliki Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Kondisi tersebut terjadi akibat distribusi tenaga kesehatan dan medis relatif belum merata antarwilayah/Kecamatan. Indikasi lainnya terlihat dari capaian keberhasilan pembangunan kesehatan yang masih kurang menggembirakan. Sampai akhir tahun 2014, tercatat angka harapan hidup masih berkisar 70,35 tahun, namun lebih tinggi dari harapan hidup Provinsi Aceh yang menunjukkan angka 69,40 tahun. Rendahnya rata-rata harapan hidup provinsi inipun disebabkan oleh adanya beberapa daerah yang memiliki angka harapan hidup sangat rendah.

6. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Rendahnya kualitas SDM berdampak pula terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bireuen, meskipun cenderung terus menurun sejak tahun 2011. Tahun 2011, tercatat penduduk miskin di Kabupaten Bireuen mencapai 19,06 persen. Angka turun menjadi 16,94 persen pada tahun 2015 atau mencapai 72.200 orang. Angka tersebut menyamai tingkat kemiskinan Provinsi Aceh yang mencapai 17,11 persen pada tahun yang sama. Masih tingginya angka kemiskinan tersebut berimplikasi kurang baik terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Bireuen di masa mendatang, mengingat tidak optimalnya dalam pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi lokal. Kondisi tersebut terjadi akibat belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin, mencakup kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Lebih lanjut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bireuen mencapai 11,02 persen pada tahun 2015. Angka TPT tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 9,02 persen. Ini berarti pemerintah daerah harus lebih memperhatikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dan juga harus terus mengembangkan program dan kegiatan sampai tercapainya angka yang paling minimum.

7. Masih kurang memadainya infrastruktur.

Di bidang pembangunan infrastruktur, permasalahan yang paling menonjol adalah kondisi jalan yang sangat memprihatinkan, terutama yang menghubungkan daerah-daerah sentra produksi dan kawasan pedalaman. Pada tahun 2015 ruas jalan Kabupaten dengan kondisi baik telah meningkat menjadi 384,92 Km atau mencapai 33,29 persen dari total ruas jalan yang menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Bireuen. Dari gambaran data pada tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi kualitas maupun kuantitas sarana jalan yang ada di Kabupaten Bireuen masih perlu terus ditingkatkan, dimana dari keseluruhan total panjang ruas jalan Kabupaten 876,8 Km, sepanjang 268,2 persen atau sekitar 30,59 persen diantaranya masih termasuk dalam kategori jalan yang tergolong dalam kondisi sedang, bahkan sepanjang



185,3 Km atau sekitar 21,13 persen jalan di daerah ini masih tergolong dalam kondisi rusak berat.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas sebagai agenda prioritas perlu diteruskan untuk dilaksanakan selama tahun 2016-2017. Terbangunnya infrastruktur jalan yang berkualitas akan membuka keterisolasian daerah dari ketertinggalan, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong percepatan perputaran barang dan jasa, dan sekaligus berdampak signifikan terhadap percepatan perekonomian Kabupaten Bireuen di masa mendatang.

Selain itu, infrastruktur yang terkait dengan air bersih juga perlu menjadi prioritas pembangunan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya air bersih yang cukup dan berkualitas di Kabupaten Bireuen. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dia merupakan sumber kehidupan bagi manusia.

Terkait dengan pengembangan Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten Santri, dan Visit Bireuen Year, maka momen kepariwisataan khususnya pengembangan pariwisata islami perlu menjadi pertimbangan pembangunan. Oleh karenanya, fasilitas yang terkait dengan pengembangan infrastruktur kepariwisataan secara umum dan pariwisata islami secara khusus sangat perlu untuk diprioritaskan.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Bireuen selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut di perbandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja



di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2016 berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu-isu strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.